

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ekonomi Daerah

Lulu Marisa Lumban Tobing *¹
Nada Aiyskamila Ramadani ²
Muhammad Nabel Azirah Djou ³
Wahjoe Pangestoeti⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia
*e-mail: lumbantobingmarisa@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis bagaimana pengeluaran anggaran pemerintah daerah mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dengan memanfaatkan metode kuantitatif serta data panel dari beberapa provinsi dalam waktu tertentu, penelitian ini mengevaluasi hubungan antara berbagai jenis pengeluaran pemerintah, seperti untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja modal, dengan indikator ekonomi utama seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan pendapatan per kapita. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran publik yang ditujukan dengan tepat pada sektor-sektor produktif memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pengeluaran yang tidak terarah atau yang bersifat konsumtif seringkali tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya efek waktu, di mana dampak dari belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi tidak langsung tampak dalam jangka pendek, tetapi baru terlihat dalam jangka menengah hingga panjang. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya perencanaan anggaran yang berbasis data, penekanan pada sektor yang menjadi prioritas, dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Kata kunci: Pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, PDRB, belanja daerah, pembangunan daerah

Abstract

This study aims to investigate and analyze how local government spending affects economic development in Indonesia within the framework of fiscal decentralization. Using quantitative methods and panel data from several provinces over a specific period, this study evaluates the relationship between various types of government spending, such as for education, health, infrastructure, and capital expenditure, with key economic indicators such as Regional Domestic Product (RDP) per capita and per capita income. The results of this study indicate that public spending targeted appropriately at productive sectors has a positive and significant impact on regional economic growth. On the other hand, untargeted or consumption-oriented spending often does not have a significant impact. Additionally, the study's findings reveal a time lag effect, where the impact of public spending on economic growth is not immediately apparent in the short term but becomes evident in the medium to long term. The implications of this study highlight the importance of data-driven budget planning, prioritizing key sectors, and improving efficiency in regional financial management. It is hoped that this study can provide empirical contributions to local governments in formulating more effective fiscal policies that support inclusive and sustainable economic development.

Keywords: Government expenditure, economic growth, GRDP, regional expenditure, regional development

PENDAHULUAN

Dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia, posisi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan alokasi anggaran sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan hak untuk mengelola pendanaan mereka sendiri melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan pengeluaran yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Salah satu alat utama yang bisa digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah adalah pengeluaran pemerintah yang diarahkan ke sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja modal. Pengeluaran di bidang ini dianggap dapat memberikan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi, baik secara langsung maupun tak langsung. Investasi pemerintah yang efektif diyakini dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan menarik investasi swasta ke daerah.

Baik teori ekonomi klasik maupun modern telah menunjukkan betapa pentingnya pengeluaran publik sebagai penggerak ekonomi. Model Keynesian menekankan bahwa intervensi pemerintah melalui pengeluaran publik bisa mendongkrak permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, teori tahap pembangunan Rostow menyoroti peran penting investasi publik dalam membangun infrastruktur dasar dan pendidikan untuk mencapai tahap lepas landas menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hukum Wagner juga menyatakan bahwa seiring dengan kenaikan pendapatan suatu negara, permintaan terhadap layanan publik meningkat, sehingga porsi pengeluaran pemerintah semakin besar.

Berbagai penelitian empiris di Indonesia mendukung pandangan ini. Contohnya, studi oleh (Andi Maujung Tjodi et al., n.d.) di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan keuangan modal memberikan dampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian serupa oleh (Astri et al., n.d.) secara nasional juga menemukan bahwa belanja di sektor sosial berkontribusi signifikan terhadap pembangunan manusia. Di Jawa Timur, (Setya Wira Pradana, 2018) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi swasta saling mendukung dalam memicu pertumbuhan ekonomi.

Namun, variasi hasil di berbagai daerah menunjukkan bahwa tidak semua pengeluaran pemerintah berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penelitian oleh (Darwin & Hardilawati, n.d.) di Provinsi Riau mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan kualitas belanja pemerintah sangat mempengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan produktivitas dan pembangunan jangka panjang. Belanja yang terlampaui tertuju pada aspek konsumtif atau berulang cenderung tidak memberi dampak ekonomi yang berarti.

Lebih jauh lagi, studi di daerah perbatasan yang dilakukan oleh (Putra, n.d.) menunjukkan bahwa belanja di sektor pendidikan dan infrastruktur telah memberikan efek positif yang kuat terhadap PDRB dan IPM secara bersamaan. Temuan ini menekankan pentingnya konteks geografis dan sosial ekonomi dari suatu daerah dalam mempengaruhi efektivitas pengeluaran publik.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk secara empiris menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Menggunakan data panel antarprovinsi dan pendekatan kuantitatif, diharapkan studi ini dapat memberikan bukti ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan strategi anggaran yang lebih efisien, produktif, dan inklusif dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk meneliti hubungan antara belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode ini dipilih karena dapat menjelaskan sejauh mana perubahan dalam variabel belanja publik mempengaruhi indikator-indikator makroekonomi daerah, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pendapatan per kapita, serta Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Penelitian ini bersifat asosiatif kausal, dengan tujuan untuk menganalisis dampak langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen, berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode statistik.

1. Populasi dan sampel

Populasi yang diperhatikan dalam studi ini mencakup seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi di Indonesia. Namun, karena keterbatasan dalam ketersediaan data, pemilihan sampel dilakukan secara purposif, yaitu hanya termasuk provinsi yang memiliki data yang lengkap dan konsisten selama periode yang telah ditentukan, contohnya antara tahun 2011 hingga 2020 atau 2008 hingga 2019. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data panel yang stabil, sehingga perbedaan antar wilayah dan waktu bisa dianalisis secara bersamaan.

Penggunaan data panel sangat sesuai dalam konteks ini karena memberikan keuntungan dalam memahami perubahan pembangunan ekonomi yang terjadi antarprovinsi selama kurun waktu tertentu, serta dapat mengontrol heterogenitas individu yang tidak terlihat.

2. Variabel dan Pengukuran

Variabel yang tidak tergantung dalam studi ini adalah pengeluaran pemerintah daerah, yang dikelompokkan berdasarkan jenis pengeluaran, yaitu: belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang kesehatan, pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, serta investasi atau belanja modal pemerintah. Kategori ini merujuk pada metodologi yang diterapkan oleh (Andi Maujung Tjodi et al., n.d.) dan (Irsyadul Ibad Abdillah & Novi Primitasari, 2023), yang memisahkan antara pengeluaran sosial, fisik, dan investasi produktif.

Variabel yang tergantung adalah pertumbuhan ekonomi daerah, yang diukur dengan PDRB per kapita (dalam rupiah) sebagai indikator kinerja ekonomi suatu wilayah. Dalam analisis tambahan, indikator pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi.

Beberapa variabel kontrol yang dipakai untuk memperkuat keabsahan model termasuk tingkat investasi swasta, jumlah populasi, tingkat kemiskinan, dan indeks sosial lainnya, yang berfungsi sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam mengevaluasi hubungan sebab-akibat antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi lokal, penting untuk memperhatikan berbagai elemen lain yang dapat berkontribusi pada indikator makroekonomi. Oleh sebab itu, studi ini mengikutsertakan beberapa variabel kontrol yang relevan untuk memastikan bahwa pengaruh yang ditemukan dari pengeluaran pemerintah benar-benar terpisah dari dampak variabel lainnya. Variabel kontrol tersebut, yang dipinjam dari model penelitian berskala nasional, mencakup tingkat investasi swasta, total populasi, tingkat kemiskinan, dan indeks sosial yang lain.

Tingkat investasi swasta, contohnya, menjadi variabel kontrol yang sangat penting karena investasi ini dapat berhubungan dengan belanja pemerintah. Dalam beberapa situasi, belanja pemerintah untuk infrastruktur atau peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa menciptakan kondisi yang lebih baik untuk investasi swasta (efek crowding in), sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Di sisi lain, jika pengeluaran pemerintah terlalu tinggi dan didanai dengan utang domestik yang besar, hal ini bisa menarik modal dari pasar yang seharusnya digunakan untuk investasi swasta, yang disebut sebagai efek crowding out. Dengan mengontrol variabel investasi swasta, model ini dapat lebih tepat dalam menilai kontribusi yang berdiri sendiri dari pengeluaran pemerintah.

Jumlah populasi dan tingkat kemiskinan juga memiliki peran penting sebagai variabel kontrol. Total populasi berpengaruh pada PDRB per kapita dan dapat menggambarkan skala

ekonomi suatu wilayah. Wilayah dengan populasi yang lebih padat bisa jadi memiliki pasar yang lebih luas dan sumber tenaga kerja yang lebih banyak, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi terlepas dari besarnya belanja pemerintah. Sementara itu, tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi fokus pengeluaran pemerintah (contohnya, dengan memberikan lebih banyak dana untuk program perlindungan sosial) dan juga merupakan indikator terhadap tantangan pembangunan yang dapat dihadapi suatu daerah. Mengontrol variabel ini memastikan bahwa pengaruh belanja pemerintah tidak terpengaruh oleh karakteristik demografis atau kondisi sosial ekonomi dasar suatu provinsi. Indeks sosial lainnya, seperti tingkat pendidikan awal atau akses terhadap infrastruktur dasar, juga dapat mempengaruhi kemampuan daerah untuk berkembang dan merespons rangsangan fiskal.

Selain variabel kontrol yang secara langsung dimasukkan dalam model, juga perlu diakui adanya faktor eksternal yang lebih luas dan tidak selalu bisa diukur secara langsung dalam model, namun tetap berdampak pada performa ekonomi suatu daerah. Faktor-faktor ini mencakup stabilitas politik antardaerah, kondisi makroekonomi nasional (seperti inflasi, suku bunga, kebijakan moneter), harga komoditas internasional (terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada sumber daya alam), serta kebijakan perdagangan luar negeri. Sebagai contoh, penurunan tajam harga komoditas bisa secara signifikan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah yang kaya akan sumber daya, yang pada gilirannya membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan belanja yang produktif. Sebagai tambahan, perubahan dalam kebijakan moneter nasional dapat memengaruhi biaya pinjaman baik bagi pemerintah daerah maupun untuk investor swasta, yang secara tidak langsung berdampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun penelitian ini lebih menekankan pada analisis data kuantitatif panel, pengakuan akan adanya dan potensi dampak dari faktor-faktor eksternal ini memberikan pandangan yang lebih lengkap dan realistis mengenai kompleksitas pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Variabel kontrol ini diadaptasi dari model yang diterapkan oleh (Astri et al., n.d.; Setya Wira Pradana, 2018) penelitian berskala nasional mereka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta laporan keuangan tahunan dari pemerintah daerah. Selain itu, data juga dikumpulkan dari dokumen statistik lain seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan realisasi anggaran daerah, dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dan pengunduhan dataset yang tersedia dalam format Excel atau PDF, yang kemudian diolah untuk analisis panel data. Keabsahan data diperiksa dengan cara membandingkan sumber-sumber yang berbeda dan menyusun kembali dalam format yang konsisten.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan model panel, yang memungkinkan pengujian terhadap berbagai variabel yang melibatkan lebih dari satu entitas (provinsi) selama beberapa periode waktu. Metode ini memberikan kekuatan statistik yang lebih besar dengan menggabungkan aspek waktu dan area. Dalam praktiknya, dua model utama digunakan: model efek tetap dan model efek acak. Pemilihan model yang paling sesuai dilakukan melalui uji Hausman, yang bertujuan untuk mengetahui apakah variasi individu sebaiknya ditangkap dengan efek tetap atau acak.

Selain menggunakan model regresi panel yang dasar, studi ini juga menerapkan metode lanjutan seperti analisis jalur untuk mengidentifikasi dampak tidak langsung dari pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan

ekonomi, serta model Autoregressive Distributed Lag untuk memahami hubungan jangka panjang antara belanja pendidikan dan pertumbuhan ekonomi (Andi Maujung Tjodi et al., n.d.; Verawati Siringoringo & Purwono, n.d.)

Pada tahap analisis ini, dilakukan juga pengujian terhadap asumsi-asumsi dasar regresi, seperti multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan uji normalitas residual, untuk memastikan bahwa model yang diterapkan memenuhi standar statistik dan ekonometrika. Ini penting agar hasil interpretasi dari model regresi dianggap valid dan dapat diandalkan.

5. Pengujian Keandalan dan Validitas

Dalam model data panel, uji Hausman diterapkan untuk memilih antara efek tetap dan efek acak. Selain itu, pengujian terhadap multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi juga dilakukan untuk menjamin keandalan model sebagaimana yang lazim dilakukan dalam praktik regresi panel ekonometrika.

6. Perangkat Lunak

Pengolahan serta analisis data dilaksanakan menggunakan perangkat lunak statistik yang terbukti efektif dalam mengolah data panel, seperti EViews, SPSS versi 17–23, dan STATA. Pemilihan perangkat ini disesuaikan dengan kebutuhan analisis dan tingkat kompleksitas, serta merujuk pada literatur sebelumnya yang telah menunjukkan validitas metode dalam penelitian mengenai kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Analisis data panel dari berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah daerah, terutama di sektor-sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan investasi, memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bisnis & Ww, 2022) serta (Yulianti & Daud, 2021) yang menyatakan bahwa belanja yang menghasilkan dampak positif dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per orang.

Temuan ini juga mendukung hasil penelitian Devarajan dan Vinaya (1993) dalam perspektif global, yang menunjukkan bahwa pengeluaran publik pada sektor-sektor, seperti transportasi dan infrastruktur, merupakan faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Secara domestik, (Putra, n.d.) menemukan bahwa daerah perbatasan seperti Kalimantan dan Papua mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat ketika pengeluaran difokuskan pada sektor pendidikan dan infrastruktur.

Meski demikian, hasil ini tidak sama di semua wilayah. Ketidacukupan belanja di beberapa daerah menunjukkan adanya variasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

2. Sektor Pengeluaran Strategis

Berdasarkan temuan dari penelitian lapangan yang bersumber dari Survei Perbatasan 2007–2014 (Putra, n.d.), pendidikan dan infrastruktur menjadi dua bidang

utama yang memberikan sumbangan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah dalam kedua sektor ini terbukti mampu meningkatkan PDRB dan IPM secara bersamaan.

Di sisi lain, sektor kesehatan, meskipun sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat. Hal ini mungkin disebabkan oleh karakter pengeluaran di sektor kesehatan yang memberikan dampak secara tidak langsung dan membutuhkan waktu lama, terutama jika tidak didukung dengan peningkatan kualitas layanan dan akses yang merata.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap prioritas pengeluaran mereka dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan efek pengganda terhadap kegiatan ekonomi setempat.

3. Validitas Asumsi Klasik (Studi Kasus Riau)

Penelitian yang dilakukan oleh (Darwin & Hardilawati, n.d.) di wilayah Riau menerapkan pendekatan regresi linier berganda untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap investasi. Temuan dari pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa semua kriteria statistik telah dipenuhi oleh model ini, antara lain:

- Tidak ada autokorelasi
- Tidak terdeteksi adanya multikolinearitas
- Tidak ada indikasi heteroskedastisitas

Oleh karena itu, model ini dapat diandalkan untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel dalam penelitian tersebut. Meskipun modelnya valid, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki dampak signifikan terhadap investasi, yang mendukung pendapat bahwa struktur belanja yang lebih banyak untuk konsumsi masih mendominasi pengeluaran daerah di Riau.

4. Signifikansi Pengeluaran terhadap Investasi Daerah

Studi yang dilakukan di Provinsi Riau menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran dan investasi memiliki nilai negatif dan tidak signifikan ($p > 0,05$) (Darwin & Hardilawati, n.d.) Hasil ini memberikan peringatan bahwa jumlah pengeluaran yang besar tidak selalu menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan anggaran. Dalam konteks Riau, pengeluaran cenderung lebih diarahkan pada kebutuhan sehari-hari dan konsumsi daripada investasi untuk jangka panjang.

Temuan ini menekankan betapa pentingnya efisiensi dalam penganggaran, yaitu memastikan bahwa pengeluaran difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan keuntungan ekonomi tinggi, seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pendidikan kejuruan, dan layanan kesehatan dasar yang dapat meningkatkan produktivitas.

5. Efek Terhadap Pendapatan Per Kapita

Data panel antara tahun 2011 hingga 2016 dari 33 provinsi menunjukkan bahwa pengeluaran modal oleh pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap

peningkatan pendapatan per kapita, baik secara langsung maupun melalui efek yang tertunda (lag effect) seperti yang terjadi pada tahun kedua (t-2)(Bisnis & Ww, 2022)Ini berarti bahwa dampak dari pengeluaran publik tidak selalu muncul segera, melainkan baru terasa setelah waktu tertentu setelah kebijakan dijalankan.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pentingnya ada evaluasi yang dilakukan dalam jangka menengah dan panjang terhadap kebijakan fiskal, karena efek yang tertunda dapat menghasilkan interpretasi yang keliru mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu program dalam penilaian jangka pendek.

Temuan tentang efek waktu atau lag effect menjadi elemen penting dalam memahami bagaimana pengeluaran pemerintah berdampak. Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dari belanja modal, misalnya, baru akan terasa nyata dalam peningkatan pendapatan per kapita dua sampai tiga tahun setelah proyek dimulai. Ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah, terutama dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, atau fasilitas umum lainnya, membutuhkan waktu untuk diselesaikan dan memberikan manfaat ekonomi secara maksimal. Proses pembangunan yang berlangsung lama, diikuti dengan waktu yang diperlukan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan infrastruktur tersebut, membuat dampak positif tidak dapat terlihat segera dalam waktu singkat. Begitu juga, investasi di bidang pendidikan, seperti peningkatan kualitas pengajar atau pembangunan sarana pendidikan, memerlukan bertahun-tahun untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan siap bersaing dalam dunia kerja, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita di daerah.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi kebijakan fiskal dalam jangka menengah hingga panjang. Penilaian yang hanya berfokus pada hasil tahunan dapat menimbulkan salah tafsir mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu program. Contohnya, jika sebuah proyek infrastruktur besar dinilai berdasarkan dampak langsungnya dalam satu tahun anggaran, sementara manfaat ekonominya baru dapat dirasakan sepenuhnya setelah tiga tahun, maka proyek tersebut mungkin dianggap tidak efektif padahal sesungguhnya memberikan efek positif dalam jangka waktu yang lebih panjang. Para pembuat kebijakan perlu mengadopsi pandangan jangka panjang dalam merencanakan dan mengevaluasi anggaran, serta memberikan pemahaman kepada publik tentang sifat efek lag ini untuk mencegah kesalahpahaman. Hal ini juga menunjukkan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan dalam kebijakan anggaran agar manfaat yang diharapkan dapat diraih secara optimal.

6. Implikasi Kebijakan dan Strategi

Kombinasi hasil dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa: Pengeluaran untuk sektor produktif seperti infrastruktur dan pendidikan secara konsisten memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran yang tidak produktif atau dialokasikan dengan tidak efisien cenderung tidak memberikan dampak yang signifikan, bahkan bisa berakibat buruk bagi investasi daerah(Darwin & Hardilawati, n.d.)Aspek waktu perlu dipertimbangkan dalam menilai efektivitas anggaran, karena dampak dari belanja publik umumnya baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun(Bisnis & Ww, 2022)

Oleh sebab itu, perencanaan anggaran di daerah harus berlandaskan pada bukti dan analisis yang berlangsung lama, serta disertai dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi, yang memungkinkan pemantauan pelaksanaan anggaran secara langsung dan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan.

Selain itu, pemerintah daerah harus bisa menemukan serta mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendiversifikasi sumber pendapatan, seperti memaksimalkan retribusi daerah, meningkatkan kualitas layanan publik yang menarik minat investasi, dan menerapkan pajak daerah dengan cara yang adil dan transparan. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah juga sangat penting untuk memastikan alokasi anggaran berlangsung secara efektif dan efisien.

7. Penyesuaian Terhadap Teori Ekonomi

Hasil studi secara umum menguatkan pandangan teori Keynesian, yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bisa meningkatkan permintaan total serta pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil di Riau menunjukkan bahwa tidak seluruh jenis pengeluaran memberikan dampak yang sama, sejalan dengan konsep teori Wagner dan Armey Curve, yang menggarisbawahi bahwa keberhasilan belanja publik tergantung pada struktur dan persentase pengeluaran terhadap PDRB.

KESIMPULAN

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di tingkat daerah memiliki efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama jika dialokasikan dengan bijaksana pada sektor-sektor kunci yang bersifat produktif. Sektor seperti pendidikan, infrastruktur, dan pengeluaran modal telah terbukti memberikan dampak positif yang konkret terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita, dan dalam beberapa situasi, juga berkontribusi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan ini mendukung berbagai penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Andi Maujung Tjodi et al., Astri et al., dan Putra, yang menegaskan pentingnya belanja produktif sebagai pendorong utama kemajuan daerah.

Meski demikian, efektivitas pengeluaran pemerintah tidak hanya tergantung pada jumlah anggaran yang dialokasikan, melainkan lebih pada struktur dan mutu pengelolaannya. Penelitian di Provinsi Riau oleh Darwin dan Hardilawati menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah yang tidak diimbangi dengan perencanaan dan alokasi yang efektif justru tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap investasi serta pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang terjebak dalam pola pengeluaran konsumtif dan kurang mengedepankan aspek produktivitas jangka panjang.

Selain itu, dampak pengeluaran pemerintah terhadap indikator ekonomi tidak selalu bersifat langsung atau instan. Penelitian oleh Bisnis dan Ww (2022) mengungkapkan adanya efek waktu (lag effect), di mana dampak pengeluaran modal terhadap peningkatan pendapatan per kapita baru akan dirasakan dua hingga tiga tahun setelah pelaksanaannya. Oleh karena itu, penilaian terhadap efektivitas anggaran tidak dapat dilakukan hanya dalam konteks tahunan, melainkan harus mempertimbangkan dinamika jangka menengah dan panjang. Hasil ini juga menunjukkan pentingnya konsistensi serta keberlanjutan kebijakan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan pengeluaran pada sektor-sektor yang berpotensi besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Pengeluaran untuk pendidikan dan infrastruktur, misalnya, tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga membuka peluang bagi investasi swasta serta memungkinkan konektivitas ekonomi antar daerah. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pengeluaran daerah, mengurangi proporsi belanja yang bersifat konsumtif, dan menerapkan pendekatan perencanaan anggaran yang berbasis hasil.

Usaha meningkatkan efektivitas pengeluaran publik harus didukung oleh penguatan kapasitas fiskal daerah. Ketergantungan pada dana transfer dari pusat harus dikurangi secara bertahap melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi potensi ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendorong kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Di sisi lain, penerapan teknologi informasi dalam manajemen keuangan dan penganggaran dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah daerah juga diharapkan lebih proaktif dalam memanfaatkan data dan hasil penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan. Evaluasi terhadap dampak pengeluaran publik sebaiknya dilakukan secara longitudinal dan mencakup indikator ekonomi serta sosial. Dengan begitu, alokasi anggaran dapat diarahkan dengan lebih tepat dan memberikan dampak yang luas terhadap pembangunan daerah.

Untuk mendukung proses kebijakan yang lebih menyeluruh, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan analisis spasial atau model kointegrasi jangka panjang yang dapat mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat secara lebih mendalam. Penambahan variabel sosial-politik, seperti kualitas birokrasi, tata kelola anggaran, dan partisipasi publik, juga penting untuk melihat variasi efektivitas pengeluaran di berbagai daerah.

Secara umum, pengeluaran oleh pemerintah daerah memiliki kemungkinan besar untuk dijadikan sebagai alat strategis dalam pengembangan ekonomi. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang teliti, berdasarkan bukti, dan fokus pada hasil. Oleh karena itu, pengeluaran publik dapat berperan tidak sekadar sebagai sarana belanja, tetapi juga sebagai dasar utama untuk pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi, memberikan dukungan, dan membantu dalam proses penyusunan riset ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini tidak mungkin selesai dengan baik tanpa kolaborasi dan bantuan dari banyak pihak.

Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang telah memberikan dukungan akademis, sarana, serta suasana ilmiah yang mendukung selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Arahan dan umpan balik dari dosen serta staf pendukung di fakultas sangat berguna dalam memperjelas analisis dan tujuan riset ini.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan berbagai pemerintah daerah di Indonesia yang telah menyediakan data sekunder yang sangat penting dalam membantu analisis kuantitatif berbasis data panel dalam penelitian ini. Data yang tepat dan menyeluruh merupakan dasar yang krusial untuk menjamin keabsahan hasil temuan yang disediakan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan peneliti, partner diskusi, dan teman-teman sejawat akademik yang telah memberikan ide-ide, kritik yang membangun. Selain

itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada tim penilai dan editor jurnal, yang telah meluangkan waktu untuk membaca, menilai, dan memberikan umpan balik yang membangun sehingga kualitas tulisan ini dapat menjadi lebih baik.

Sebagai penutup, penulis berharap riset ini dapat memberikan sumbangan yang positif dalam pengembangan studi ekonomi publik dan tata kelola fiskal daerah, serta dapat menjadi referensi bagi para pengambil keputusan, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik dalam kajian mengenai pengeluaran pemerintah dan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Maujung Tjodi, Try Oldy Rotinsulu, & George M.V Kawung. (n.d.). *23428-47804-1-SM. 19(PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, SEKTOR KESEHATAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI DI PROVINSI SULAWESI UTARA))*.
- Astri, M., Indah Nikensari, S., & Kuncara SE, H. W. (n.d.). *PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA*. <http://www.jpneb.net>
- Bisnis, K., & Ww, S. (2022). *Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pendapatan Per Kapita Daerah : Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia*. 30(2), 1. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i1>
- Darwin, R., & Hardilawati, W. L. (n.d.). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pegerakan Investasi Provinsi Riau Analysis of Economic Growth and Government Expenditure On The Investment Movement of Riau Province*.
- Irsyadul Ibad Abdillah, & Novi Primitasari. (2023). *Irsyadul+Ibad+494-503. 7(ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR)*, 1–10.
- Putra, W. (n.d.). *Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia (Vol. 6, Issue 2)*.
- Setya Wira Pradana. (2018). *agusafeb,+SETYA+WIRA+PRADANA. ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR*, 1.
- Verawati Siringoringo, M., & Purwono, R. (n.d.). *PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*. 5(1), 2021.
- Yulianti, & Daud. (2021). *garuda3194293. 7(TEORI PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMERINTAH KAJIAN EKONOMI SYARIAH)*, 1–6.